

**KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT PANDANGAN
FAJLURRAHMAN JURDI DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Disusun Oleh:

**TAUFIQURRAHMAN HADI
NPM. 1321020122**

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT PANDANGAN
FAJLURRAHMAN JURDI DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT PANDANGAN FAJLURRAHMAN JURDI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Oleh:

Taufiqurrahman Hadi

Konsep negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum yaitu bahwa segala segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang umat manusia. Menurut Fajlurrahman Jurdi, Secara historis, konsep negara hukum dapat di jelaskan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa konsep negara hukum dalam Islam atau yang disebut dengan nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang mengacu pada hukum Islam dan memiliki prinsip-prinsip umum yaitu hukum sebagai landasan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep negara hukum pandangan Fajlurrahman Jurdi dan bagaimana konsep negara hukum pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh serta memperluas wawasan dalam konsep negara hukum dalam pemikiran Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Konsep Negara Hukum Menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam perkembangannya hampir seluruh negara menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala macam asas dan bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam pemikirannya Fajlurrahman Jurdi bahwa sebuah kekuasaan bersumber dari hukum yakni kepastian sosial atau menganut konsep negara hukum *rechtstaat* yaitu negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa konsep negara hukum menurut Fajlurrahman Jurdi yaitu dalam menetapkan atau menerapkan suatu keputusan hukum harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis, karena dianggap memberikan kepastian hukum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, makaskripsisaudara.

Nama : Taufiqurrahman Hadi

NPM : 1321020122

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**Judul Skripsi : KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT
PANDANGAN FAJLURRAHMAN JURDI DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031000**

Ketua Jurusan Siyasah

**Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP. 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, disusun oleh Nama: **Taufiqurrahman Hadi NPM. 1321020122**, Program Studi : **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis/ 12 Juli 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom. I. (.....)

Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Drs. Maimun, S.H., M.A (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

**D. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا ط ۭ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ
تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْدَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan..¹(Q.S. An Nisa : 135)

¹ Departemen Agama RI, *AlQur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro,2010), h. 79.

PERSEMBAHAN

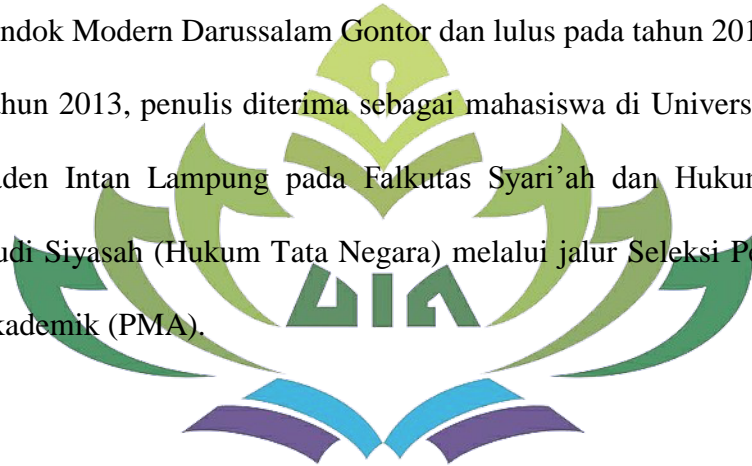
Dengan ini segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doanya akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Abdul Hadi Rahman (Alm) dan Ibu Cik Ijah yang senantiasa dan tiada henti-hentinya mendukung, menyayangi, menemaniku dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku, membesarkanku dengan do'a dan jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Keluargaku Kakak-kakak ku tercinta Ummu Azizah Hadi beserta Keluarga, Ida Arifah Hadi beserta Keluarga, Marbawi Rahman Hadi beserta keluarga dan Semua Bibi-bibi dan Paman-paman ku yang tak dapat kusebutkan satu persatu , yang telah membantu materil maupun moril dan yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga kabulkan mimpi, cita-cita kita. Dan kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dan Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Taufiqurrahman Hadi dilahirkan di Kalianda pada tanggal 16 Agustus 1994, merupakan anak keempat dari empat bersaudara putra pasangan Bapak Abdul Hadi Rahman (Alm) dan Ibu Cik Ijah Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. SD Negeri Palas Aji diselesaikan tahun 2006.
2. Pondok Modern Darussalam Gontor dan lulus pada tahun 2012.
3. Tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) melalui jalur Seleksi Penelusuran Minat Akademik (PMA).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyah (Hukum Tata Negara Islam), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN RadenIntan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

5. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Drs. Maimun, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Badruzzaman, S.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Siyasah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Keluarga besarku, saudara-saudara, paman dan bibi, nenek, adik, kakak, dan ponakan yang mendukungku.
11. Teman dekatku, Fadhil, Aswan, Rahman, Agil, Ahmad, Ardi yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
12. Teman-teman Siyasah angkatan 2013, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini.
13. Orang-orang yang mendukung Indah, Saputra, Dede, Buy, Bleki, Deka, Tile, Obem, Adi, Agung, Bul-bul, Sandi, Fariz.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Juni 2018

Penulis

Taufiqurrahman Hadi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM	
A. Pengertian dan Konsep Negara Hukum	17
B. Prinsip-prinsip Negara Hukum	28
C. Sejarah Negara Hukum	34
D. Negara Hukum dalam Islam.....	40
BAB III PANDANGAN FAJLURRAHMAN JURDI TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH	
A. Biografi Fajlurrahman Jurdi	49
B. Karya-Karya Fajlurrahman Jurdi	50
C. Pandangan Fajlurrahman Jurdi tentang Konsep Negara Hukum	51
D. Pandangan Fajlurrahman Jurdi tentang Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah	70

**BAB IV ANALISIS KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT
FAJLURRAHMAN JURDI DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH
DUSTURIYYAH**

- A. Konsep Negara Hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi78
- B. Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam
Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah82

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan86
- B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “*Konsep negara hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah*”, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Konsep adalah rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang diluar bahasa digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain¹.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang mempunyai wilayah tertentu, rakyat yang diperintah oleh penguasa, pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain².

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat³.

Pandangan adalah mengandung arti pendapat atau menurut para tokoh⁴.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,2007), h. 725.

²M. Iwan Setiawan, *Ilmu Negara* (Jakarta :Rajawali Pers,2016),h .6.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007), h.167.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,*Op.Cit*, h.1011.

Fajlurrahman Jurdi adalah merupakan tenaga pengajar pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif Republik Institute, bekerja sebagai Tenaga Ahli DPR RI periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, namun mengundurkan diri sejak Maret 2015, beliau lahir di Bima 13 Juli 1984 dan menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin dan Magister Hukum di Universitas Hasanuddin⁵.

Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara⁶. Jadi dari beberapa penjelasan dan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi *“Konsep negara hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah”*, adalah Studi analisis pandangan Fajlurrahman Jurdi mengenai Konsep Negara Hukum dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

⁵Fajlurrahman Jurdi, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Fajlurrahman_Jurdi, pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 22.39

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h. 31.

1. Alasan Objektif

- a. Konsep Negara Hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan pemikiran umat manusia serta berbagai tipe negara hukum berdasarkan konstitusi yang dianutnya .
- b. Sedangkan dalam fiqh siyasah dusturiyyah pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi sosial, politik dan kesepakatan di antara rakyat dan pemimpin mereka.
- c. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis konsep negara hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- c. Fajlurrahman Jurdi merupakan tenaga pengajar pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif Republik Institute.

C. Latar Belakang Masalah

Catatan tentang negara hukum telah diuraikan di berbagai tempat dan ruang sosial. Pemikir-pemikir baik di Barat maupun Timur menempatkan kajian negara hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi yang besar. *Space* kajian negara hukum dengan segala instrumennya, membawa kita pada suatu asumsi dasar, bahwa hukum telah menjadi satu kajian penting bagi bangunan dasar hukum negara⁷.

Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggendong resiko membatasi membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah.

Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah sempurna) hukum diciptakan juga mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki kekuatan legistimasi⁸.

Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang :Setara Press, 2016), h.13.

⁸ *Ibid*, h.14.

dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan.

Sebab itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi “obyek”, mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.

Konsep negara yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau negara hukum formal atau *formile rechtsstaat*. Tugas negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalu lintas masyarakat. Akan tetapi tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial.

Keberadaan hukum sebagai bangunan dasar untuk mengintergrasikan kelompok-kelompok sosial masyarakat (*social groups*) menjadi tak terhindarkan. Karena kelompok-kelompok sosial itu partikular (*social groups particulary*), maka yang menyatukan partikularisme (*from particular to intergrated*) kelompok

sosial itu adalah negara. Negara memiliki instrumen hukum (*law instrument*) sebagai pengatur juga sebagai perekayasa sosial.

Negara sebagai entitas sosial, memiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban-kewajiban asasi negara yang berat dan membutuhkan kekuatan ekstra, mengharuskannya membentuk instrumen-instrumen sebagai alat. Dan kewajiban inilah yang menyebabkan negara harus memberi hukuman (punishment) kepada mereka yang melanggar instrumen negara. Inilah yang menjadi salah satu ciri terpenting dari negara hukum⁹.

Pemikiran tentang negara hukum telah lama muncul sejak sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa¹⁰.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil war*, adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :

- 1). Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- 2). Adanya pembagian kekuasaan negara.
- 3). Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

⁹*Ibid.* h. 17.

¹⁰Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 90.

Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan namun saling berkaitan. Negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum, negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itulah, negara juga dipandang sebagai suatu bangunan hukum (*legal entity-legal subject*).¹¹

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum yaitu bahwa segala segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.

Secara konsepsional, hingga kini terdapat lima konsep utama negara hukum, ialah *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, nomokrasi Islam, dan negara hukum pancasila. Dari masing-masing konsep tersebut, mempunyai karakteristik yang bersifat khas.

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang umat manusia. Karena

¹¹M. Iwan Setiawan, *Op. Cit.* h.107.

itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum¹².

Dalam catatan sejarah ketatanegaraan, konsep negara hukum merefleksikan beragam varian dan dianut oleh sejumlah negara. Ada tipologi negara hukum yang merefleksikan konsep hukum dari Qur'an dan Sunnah atau tipologi negara hukum nomokrasi Islam, negara hukum konsep Eropa Kontinental, tipologi negara hukum Anglo-Saxon, tipologi negara hukum *sosialis legality* dan tipologi negara hukum pancasila. Tipe negara hukum tersebut memiliki ciri dan karakter hukum tersendiri dalam merefleksikan nilai-nilai konstitusi yang dianutnya.

Menurut Fajlurrahman Jurdi, Secara historis, konsep negara hukum dapat diasalkan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebutuhannya, bergerak dari individu menuju relasi sosial sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan-kesepakatan ataupun konsensus-konsensus yang lazim disebut kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum yakni hasil kesepakatan sosial.¹³

Pada dasarnya prinsip-prinsip negara hukum tidak dapat dilepaskan dari paham kerakyatan. Hal ini disebabkan hukum yang mengatur dan membatasi

¹²Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit* , h.17.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum ..., Op. Cit* , h.viii.

kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai asas “*lex populi suprema lex*” (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Begitu eratnya hubungan ini sehingga muncullah sebutan negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*.

Pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Kedua, politik luar negeri (siyasah dauliyyah / siyasah kharijiyyah). Ketiga, politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).¹⁴

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyyah konsep negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana, negara hukum berarti negara yang

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h .4.

¹⁵ *Ibid.* h. 177.

menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya bukan supremasi kekuasaan.

Pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi sosial, geografis budaya, politik dan kesepakatan diantara rakyat dengan pemimpin mereka. Menurut Tahir Azhari, ada negara-negara didunia ini. *Pertama*, negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, negara hukum menurut konsep negara Eropa Kontinental seperti yang di terapkan oleh Belanda, Jerman, dan Perancis yang disebut *rechtsstaat*. *Ketiga*, konsep negara hukum (*rule of law*) yang diterapkan negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. *Keempat*, konsep *socialist legality* yang diterapkan negara-negara sosialis-komunis, seperti Uni Soviet sebelum bubar pada 1991. Dan *kelima* konsep hukum pancasila¹⁶.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanat
2. Prinsip musyawarah (musyawarat)
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian

¹⁶*Ibid*.h .230.

8. Prinsip kesejahteraan

9. Prinsip ketaatan rakyat.¹⁷

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya “ bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi* “. Kant memahami negara hukum sebagai negara jaga malam yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori trias politika
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialist yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang di pelopori oleh negara-negara anglo saxon. *Socialist legality* berbeda dengan konsep barat karena dalam socialist legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme. Konsep socialist legality sulit untuk dikatakan sebagai konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi, mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 84.

komunis/sosialis merupakan konsep yang mereka pandang doktrin komunisme/sosialisme.¹⁸

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Gemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tidak tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Istilah *rechtsstaat* dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 jelas merupakan suatu *genus begrip* yang dapat di jelaskan dengan istilah negara hukum dalam bahasa Indonesia. Maka istilah negara hukum Pancasila adalah merupakan pengertian khusus, sebagaimana yang dimaksud (secara implisit) oleh penjelasan undang-undang dasar 1945.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menurut penulis menarik untuk diteliti, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :

1. Bagaimana konsep negara hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi ?

¹⁸*Ibid.* h. 91.

2. Bagaimana konsep negara hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyyah ?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui secara mendalam tentang pemahaman Konsep Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah.
 - b. Untuk memaparkan pemikiran Fajlurrahman Jurdi dalam perspektif Fiqh Siyasah dusturiyyah mengenai Konsep Negara.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Konsep Negara Hukum.
 - b. Memberikan gambaran mengenai pemikiran Fajlurrahman Jurdi tentang konsep negara hukum dalam perspektif Fiqh Siyasah.
 - c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami teori tentang Konsep Negara
 - d. Sumbangan pemikiran ilmiah kepada almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. *Jenis Penelitian*

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya”¹⁹.

b. *Sifat Penelitian*

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek atau subyek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya²⁰.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan

¹⁹Ahmadi Muhammad Munawar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research* (Sumbangsih, Yogyakarta, 1975), hlm. 2.

²⁰Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Fakultas Ekonomi, Jakarta, 1981), hlm. 11.

buku-buku yang dikarang oleh Fajlurrahman Jurdi. Yang antara lain:

Teori Negara Hukum.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditulis tokoh politik yang lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Yakni dari buku-buku, majalah, dan Koran.

3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain-lainnya²¹.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis, langkah yang digunakan adalah memeriksa data-data yang telah terkumpul secara konsepsional atas makna yang terkandung secara intensif. Analisis data ini merupakan pemikiran yang merinci masalah data, fakta dan sumber-sumber data secara kritis. Untuk menyajikan data dalam konteks ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²².

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi II, Renika Cipta, Jakarta, 1993), hlm. 107.

²²Lexy J. moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remadja Rosda Karya, Bandung, 1991), hlm. 3.

Di samping itu, analisis kualitatif ini diuraikan untuk memahami dan menafsirkan pemikiran Fajlurrahman Jurdi dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam hal Konsep Negara Hukum.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM

A. Pengertian dan Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.²³ Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut ditegaskan oleh Aristoteles.²⁴ Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh

²³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 12

²⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 1

absolutisme. Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan padapengaturan (hukum) yang baik. Dari konsep ini yang diidealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan kedalam bukunya *politica*.²⁵ Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”.

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul daripolis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luasdan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h. 2.

dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁶ Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.²⁷ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁸

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.²⁹ Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.

²⁶ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987),h. 153.

²⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),h. 166.

²⁸ Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, h. 153.

²⁹ Rozikin Daman, *Op.Cit*, h. 166.

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.³⁰ Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.³¹

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

³⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

³¹ TahirAzhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 1995),h. 20-21.

Dalam perkembangnya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwaker staat*.³²

Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia.³³

Menurut Munir Fuady, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara hukum tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembeda yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, *gender*, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan,

³²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PusatStudi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, 1987),h. 152.

³³Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang : Angkasa Raya Padang,1992),h. 18.

sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara otomatis.³⁴

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).³⁵ Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata-kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah “negara dan hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan

³⁴M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*, *Op.Cit.* h. 108.

³⁵Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit.* h. 18.

adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum.

Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b) Azas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c) Pemisahan Kekuasaan Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu lembaga.³⁶

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk di kaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu

³⁶Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011),h. 117-118.

diketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.

Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika mengintroduksi konsep *nomoi*. Beliau mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya *Politicos*.

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Konsep *rechtsstaat* ini dikemukakan oleh *Frderick Julius Sthahl* dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal,³⁷ yaitu sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).

³⁷ Moh.Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta : GamaMedia, 1999),h. 127.

d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara *anglo-saxon* menyebutnya sebagai *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada system *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *anglo-saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitik beratkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitik beratkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukthie Fadjar, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus

berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.³⁸ Tahir Azhary, dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri atas lima konsep sebagai berikut :

- a) Konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Al-Sunnah yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam
- b) Konsep negara hukum eropa kontinental yang disebut *rechtsstaat*
- c) Konsep *rule of law*
- d) Konsep *socialist legality*
- e) Konsep negara hukum pancasila³⁹

Dalam perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti :

³⁸Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang : Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, 2005),h. 7.

³⁹Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit*, h. 83

1. Negara hukum menurut nomokrasi Islam.⁴⁰ Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut (prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat)⁴¹.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law*. Karakteristik *civil law* adalah Administratif.
3. Negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.
4. Konsep *socialist legality*, *Social legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.
5. Konsep negara hukum pancasila.⁴²

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi...*, *Op.Cit*, h. 1.

⁴¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit*.h.85-86.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi...*, *Op.Cit*, h. 2.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang, berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.⁴³

B. Prinsip-prinsip Negara Hukum

Menurut The International Commission of Jurist, menyatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan adanya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Menurut “*The International Commission of Jurist*”, ada tiga prinsip penting dalam negara hukum yaitu :

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas yang tidak memihak⁴⁴

Maka pada dasarnya prinsip negara hukum tidak dapat dilepaskan dari paham kerakyatan. Hal ini disebabkan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan

⁴³ Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit.* h. 95.

⁴⁴ M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*, *Op.Cit.* h. 108.

negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai asas "*lex populi suprema lex*" (suara rakyat adalah hukum yang tertinggi). Begitu eratnya hubungan ini sehingga muncullah sebutan negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*. Menurut J.B.J.M. ten Berge prinsip-prinsip negara hukum, sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-undang. Tanpa dasar Undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.⁴⁵

Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-undang tertulis (Undang-undang formal).

2. Perlindungan hak-hak asasi.

3. Pemerintah terikat pada hukum.

⁴⁵Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi...*, Op.Cit, h. 78.

4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridispenegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.

5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum di perlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah

bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.⁴⁶

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan, antara lain :

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.

Berdasarkan pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service atau public service*) . Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muara nya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam pemikiran tersebut, Abdul Hakim G. Nusantara menguraikan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dalam bentuk praktis-strategis sebagai berikut :

⁴⁶ Uthrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962), h. 9.

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Bentuk operasionalnya dilakukan melalui pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam parlemen (DPR), dan kemudian untuk menyusun keanggotaan MPR. MPR inilah yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan, dan menetapkan GBHN.
2. Adanya pembagian kekuasaan yang seimbang yang menggambarkan secara nyata adanya sistem *check and balance* antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah.
4. Bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum positif yang berlaku.
5. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin kesejahteraan yang merata dan sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.⁴⁷

Menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan:

”... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang

⁴⁷Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : LKiS, 2001), h. 53.

melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah⁴⁸ :

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due process of law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

C. Sejarah Negara Hukum

Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa negara selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karena itu perkenankanlah kami berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar kita yaitu, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), h. 397.

hukum, dengan rumusan "rechtstaat" dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genubegrip), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.⁴⁹ Sejak reformasi pada tahun 1998, kita telah melakukan perubahan mendasar di politik yang semakin terbuka dan demokratis. Reformasi politik telah diarahkan untuk membuka ruang kebebasan yang luas bagi segenap warga negara, sedangkan reformasi ekonomi dikembangkan secara sungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan ekonomi pasar yang semakin terbuka dalam rangka memberikan jaminan bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, yang menjadi masalah kita ialah bahwa pembangunan demokrasi politik dan pembangunan ekonomi kesejahteraan itu memerlukan dukungan dari segi hukum atau bidang hukum. Demokrasi politik tanpa diimbangi oleh "the rule of law" akan menghasilkan kebebasan yang tidak terkendali dan tidak teratur. Tanpa dukungan hukum, pembangunan ekonomi pasar juga tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang merata atau berkualitas. Sebaliknya, hukum juga memerlukan dukungan politik yang sehat dan bertanggung jawab serta perkembangan ekonomi masyarakat yang menjadi basis sosial untuk terbentuknya lapisan masyarakat hukum yang teratur.

⁴⁹Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 8.

Kondisi Negara Hukum Indonesia kita dewasa ini sangat memprihatinkan. Hukum diperlukan kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik kita perlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan (*policy executing*), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara. Namun pada kenyataan praktik, baik dalam konteks pembuatan kebijakan (*policy making*) maupun dalam konteks pelaksanaan kebijakan (*policy executing*), masih terlihat adanya gejala anomie dan anomali yang belum dapat diselesaikan dengan baik selama 11 tahun pasca reformasi ini. Dari segi sistem norma, perubahan-perubahan telah terjadi dimulai dari norma-norma dasar dalam konstitusi negara yang mengalami perubahan mendasar. Dari segi materinya dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan 300 persen dari isi aslinya sebagaimana diwarisi dari tahun 1945. Sebagai akibat lanjutannya maka keseluruhan sistem norma hukum sebagaimana tercemar dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus pula diubah dan diperbarui.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.* h. 10.

Gagasan Negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan imperasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian* dan sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*.

Dalam khazanah negara ilmu negara (*staatslehre*) dan filsafat hukum (*legal philosophy*), sejarah ide mengenai negara hukum sudah dikenal sejak zaman plato (427-347 SM). Saat itu, Plato menggunakan istilah *nomoi* untuk yang menyebut yang sekarang disebut negara hukum.

Dalam buku *nomoi* yang berarti undang-undang, Plato selalu menekankan pentingnya eksistensi undang-undang untuk membimbing warga negara kepada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Kebebasan dan keteraturan warga dalam suatu negara bisa terjamin dengan adanya aturan-aturan hukum. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan hukum itu, sebagai konsekuensi dari jaminan, harus diberi hukuman. Akan tetapi, plato memandang hukuman itu bukan sebagai balasan atas ketidakadilan, melainkan merupakan konsekuensi dari pelanggaran

yang diperbuatnya. Karena menurut Plato, pelanggaran adalah suatu penyakit dalam bagian intelektual manusia.⁵¹

Ide Plato ini kemudian digali dan dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804). Ia beranggapan bahwa negara yang baik adalah negara hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*). Karena itu, ide negara hukum versi Kant ini lebih dikenal dengan nama negara “jaga malam” (*nachtwaker staat*).

Berkaitan dengan ide negara hukum ini, Kant menerima prinsip Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) tentang kehendak umum (*volonto generale*), dan ajaran Montesquieu (1688-1755).⁵²

Kant berpendapat bahwa titik pangkal negara hukum adalah aturan-aturan hukum. Aturan hukum itu hanya dapat terealisasi dengan baik, bila mendapatkan dukungan dari semua warga negara. Tanpa dukungan warga negara, aturan-aturan hukum tersebut hanyalah berupa teks-teks belaka yang tak bermakna secara nyata, dan dalam pelaksanaannya akan mengarah pada otoriterisme. Karena itulah, Kant menerima kehendak umum (*volonte generale*) seperti yang dianut oleh Rousseau.

Sedangkan dalam menerapkan ajaran trias politika, Kant memposisikan kekuasaan legislative sebagai kekuasaan yang tertinggi, diatas kekuasaan

⁵¹ Marzuki Wahid, Rumadi, *Op. Cit. Fiqh Madzhab Negara...*, h. 44-45.

⁵² *Ibid.* h. 46.

eksekutif dan yudikatif. Karena menurutnya, kekuasaan legislative hanya dapat dimiliki oleh rakyat dan rakyatlah yang mempunyai kedaulatan.

Sebelum lahir negara hukum, yang ada pada waktu itu adalah negara polisi (*polize staat*) sebagai tipe negara yang dianut saat itu. Gagasan mengenai negara hukum mengalir terus dalam arus sejarah. Mulai dari negara hukum liberal (jaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan pada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*). Masing-masing tipologi ini mempunyai tokoh dan prinsip-prinsipnya sendiri.

Mengenai hubungan negara hukum dengan kemakmuran rakyat, terdapat korelasi segitiga antara negara polisi (*polize staat*), negara hukum liberal (*nachwakerstaat*) dan negara hukum formal (*formele staat*). Dengan menggunakan dialektika Hegel, bisa dikatakan negara polisi adalah sebuah *tesis*, negara hukum liberal adalah *antilesis*, sedangkan *syntesisnya* adalah negara hukum formil. Sebab, pada negara polisi, raja (istilah penguasa dalam negara monarkhi) mempunyai kekuasaan mutlak terhadap urusan kemakmuran rakyatnya, dan rakyat tidak diperbolehkan turut campur tangan. Sedangkan pada negara hukum liberal justru yang terjadi sebaliknya, negara tidak boleh turut campur tangan sama sekali terhadap urusan kemakmuran rakyatnya, rakyat sendiri yang memetakannya. Adapun negara hukum formil hadir sebagai perpaduan antara keduanya yang antagonistic itu. Negara hukum formil

mengajarkan bahwa negara boleh campur tangan dalam urusan kemakmuran rakyat, akan tetapi harus dibatasi dengan undang-undang agar penguasa negara tidak berbuat sewenang-wenang.

D. Negara Hukum dalam Islam

Negara hukum dalam Islam dimaksudkan negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah. Untuk konsep tersebut, Muhammad Tahir Azhary cenderung menggunakan istilah “nomokrasi Islam” dan Malcom H. Kerr. Demikian juga, Majid Khaddun menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara dan sudut Islam.⁵³

Dalam pandangan Muhammad Tahir Azhary, penggunaan istilah nomokrasi Islam itu dinilai lebih tepat, karena di samping untuk memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam, juga untuk membedakan dengan konsep negara hukum menurut konsep Barat, Gagasan tentang negara hukum telah dikemukakan oleh pemikir muslim yaitu Ibnu Khaldun. Menurutnya, negara hukum itu ada dua macam:⁵⁴

1. Siyasah dinniyyah
2. Siyasah ‘aqliyyah.

Kedua bentuk negara hukum tersebut diterjemahkan dengan nomokrasi Islam dan nomokrasi sekuler.

⁵³Setia Senoadji, Oemar, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Praja, 2011) h. 53

⁵⁴Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit.*h.85.

Menurut Muhammad Tahir Azhary, nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Quraan surah an-Nisa : 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Karena dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang digariskan dalam Al-Qurán dan dicontohkan dalam tradisi Nabi. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Apapun bentuk bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan.⁵⁵

2. Prinsip Musyawarah

⁵⁵Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, Op.Cit.h. 105

Dalam al-Qurán ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Ayat yang pertama dalam surat as-Syura : 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat yang kedua dalam surat ali Imran : 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُمْ خُذُّوا حِيلًا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari al-Qurán. Cukup banyak ayat-ayat al-Qurán yang menggambarkan tentang keadilan.⁵⁶

Dalam surah an-Nisa : 135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim perkataan keadilan :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan.

⁵⁶*Ibid.* h. 117.

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami Antara lain dari al-Quraan, surah al-Hujurat : 13 :

يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya.⁵⁷

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan setiap Hak Asasi Manusia

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Quraan antara lain dalam surah al-Isra : 70 :

⁵⁷ Ibid. h. 124.

Proklamasi al-Qurán melalui ayat-ayat tersebut diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu :

- a. Persamaan manusia
- b. Martabat manusia
- c. Kebebasan manusia.

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam nomokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapa pun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.

Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim pula bebas menentukan dan memutuskan putusannya. Bahkan ia memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.⁵⁸

7. Prinsip Perdamaian

Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan, dan pula ia mengandung suatu makna yang didambakan oleh

⁵⁸ *Ibid.* h. 144.

setiap orang yaitu perdamaian. Al-Qurán sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian.⁵⁹

Nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus terjalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-Qurán.

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara juga berkewajiban meperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qurán telah

menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.* h. 146.

⁶⁰ *Ibid.* h. 150.

Dalam nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimunan harta ditangan seseorang atau sekelompok orang sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam ialah memerangi kemiskinan, sekurangnya menghilangkan kesenjangan antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan orang-orang yang kurang mampu.

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah an-Nisa : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Inti dari koreksi rakyat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa berupa teguran atau nasehat agar

penguasa menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan Allah dan Rasul-NYA.

Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah, kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya. Ia atau mereka berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan-kepentingan umum.⁶¹



⁶¹*Ibid.* h. 155.

BAB III

PANDANGAN FAJLURRAHMAN JURDI TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Biografi Fajlurrahman Jurdi

Fajlurrahman Jurdi Lahir di Bima, 13 Juli 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin dan Magister Hukum Universitas Hasanuddin. Masing-masing diselesaikan pada tahun 2008 dan 2011. Fajlurrahman Jurdi merupakan tenaga pengajar pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menjadi sebagai Direktur Eksekutif Republik Institute, bekerja sebagai Tenaga Ahli DPR RI periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, namun mengundurkan diri sejak Maret 2015.

Sejak Januari 2016 menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.⁶² Aktif pada Pusat Kajian Konstitusi Universitas Hasanuddin serta Redaktur Jurnal Konstitusi Kerja Sama Pusat Kajian Konstitusi Unhas dengan Mahkamah Konstitusi RI. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP)-Indonesia (2005-2010), Project Officer pada Profetik Institute, Popular Education, Research and Empowerment, peneliti pada Centre for Freedom and Social Transformation (CONFRONT)-Jakarta, Sekum IMM Kom. FIS UNHAS (2003-2004), Pengurus ISMAHI Sul-Sel (2007-2009), Wakil Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Unhas, Koordinator Lingkaran Studi Hukum Progresif Unhas, PC. IMM Makassar Perintis (2003-2005), anggota

⁶²Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum ..., Op. Cit* , h.257.

Lembaga Pers DPD IMM Sul-Sel (2003-2005), Wakil Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas (2004-2005), Ketua Badan Kehormatan Mahasiswa (BKM) Fakultas Hukum Unhas (2006-2007), Ketua DPD IMM Sul-Sel (2008-2009), Ketua DPP IMM (2012-2014). Sejak Januari 2016 menjadi Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.⁶³

B. Karya-Karya Fajlurrahman Jurdi

Fajlurrahman Jurdi Menulis Buku Antara Lain:⁶⁴

1. Teori Negara Hukum (2016)
2. Membalut Luka Demokrasi dan Islam (2004)
3. Aib Politik Muhammadiyah (2007)
4. Krisis Yudisial, Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim (2007)
5. Predator-Predator Pasca Orde Baru, Membongkar Aliansi Leviathan dan Kegagalan Demokrasi di Indonesia (2008)
6. Aib Politik Islam (2009)
7. Paradoks Konstitusi (2009)
8. Gerakan Sosial Islam (2009)
9. Aib Politik Indonesia (Naskah Siap terbit)
10. Oposisi Lintas Kelas Mendesak Demokrasi (Naskah Siap terbit)
11. Konstitusi Republicant (naskah sedang digarap).

⁶³*Ibid.* h. 258

⁶⁴ Fajlurrahman Jurdi, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jurdi__Fajlurrahman., pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 22.45

Menjadi editor untuk buku-buku antara lain:

1. Feminisme Profetik (2007)
2. Trias Politica Dalam Sistem Ketatanegaraan (PuKAP: 2008)
3. Hukum Internasional (2008)
4. Jalan Terjal Good Governance (2009)
5. Persekongkolan Rezim Politik Lokal (2009)
6. Politik Hukum Pertanahan (2009)
7. Islam dan Konstitusi (2009)
8. Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia (2009)
9. Paradoks Kehidupan (2009)
10. Menulis diberbagai media massa lokal dan nasional.

C. Pandangan Fajlurrahman Jurdi tentang Konsep Negara Hukum

Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan UUD 1945 sebagai sebagian dari hukum dasarnya (konstitusi).

Kalau dikaji secara kritis, gagasan dan pandangan Fajlurrahman Jurdi menjelaskan bahwa menurutnya secara tekstual tak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum, kecuali kata *rechtsstaat* yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara, seperti yang telah disebutkan dikemukakan. Konsep negara hukum dalam UUD 1945 tidak semata-mata ada atau tidaknya teks

tersebut, melainkan makna substansi yang terkandung dalam pembukaan, Batang Tubuh, dan penjelasannya itu cukup signifikan untuk disebut negara hukum.⁶⁵

Simbol bahasa yang digunakan UUD 1945 dalam menyebut negara hukum Indonesia adalah *rechtsstaat* (Belanda/Jerman), bukan *rule of law* atau *legal state* (Inggris), atau *etat de droit* (Prancis). Meskipun konsep negara hukum Indonesia tidak identic dengan konsep *rechtstaat*, akan tetapi untuk memahami negara hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari ide dasar tentang *rechtstaat* itu sendiri. Ide *rechtstaat* jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap filosofi negara hukum Indonesia.

Secara konsep, *rechtstaat* (liberal Eropa continental) dengan *rule of law* (liberal anglo saxon) terhadap perbedaan. Di antara penyebab perbedaan yang melatarinya adalah, *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menantang absolutism, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.

Di samping itu, *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, yang lebih menekankan pada aspek administrative. Sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* yang disebut *common law*, sehingga penekanannya pada aspek *judicial*.

⁶⁵Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara* (Jakarta: Bee Media 2007) h. 318.

Fajlurrahman Jurdi dalam mendeskripsikan konsep negara hukum ternyata mengutip dari beberapa pemikir diantaranya, Albert Venn Dicey dalam bukunya *An Intoduction to the Study of the law of the Constitution*, seperti dikutip Satya Arianto, memberikan persyaratan bagi sistem *rule of law* ke dalam tiga unsur ideal yaitu :

1. *Supremacy of law*, yang berarti tidak kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*). Baik rakyat maupun penguasa kedua-duanya tunduk pada *regular law*. Yang berdaulat, berkuasa, dan *supreme* adalah hukum.
2. *Equality before law* yang berarti tidak ada hukum yang istimewa. Semua mempunyai nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3. *Constitution based on human rights*, yaitu adanya UUD yang unsur *grondrechten*-nya lebih primer.⁶⁶

Berdasarkan dengan Friederich Julius Stahl, seorang tokoh paham negara hukum materiil.

1. Berdasarkan hak-hak asasi.
2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan baik harus ada pemisahan kekuasaan (*trias politica*).
3. Pemerintahnya harus berdasarkan UU/hukum (*wetmaticbestuur*) dalam (*rechtssaat*) materiil, dan ditambah prinsip *doelmatic bestuur* dalam *sociale verzorgingstaat*.

⁶⁶Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum ...*, Op. Cit , h. 22-23.

4. Apabila dalam perlindungan hak asasi dengan berdasarkan UU, masih terdapat pelanggaran, maka untuk melihatnya perlu ada peradilan administrasi.⁶⁷

Adapun paham *rechtssaar* memberikan persyaratan dasar bagi suatu negara hukum sebagai berikut :

1. Asas legalitas

Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan landasan ini UU dalam arti formul dan UUD sendiri merupakan umpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini, pembentukan UU merupakan bagian penting dari negara hukum.

2. Pembagian kekuasaan (*distribution of power*)

Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan kekuasaan.

3. Hak-hak dasar (*grondrechten*)

Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan UU.

4. Pengawasan pengendalian

Bagi rakyat tersedia sluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*).

⁶⁷Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982),h. 57-58.

Apabila melihat persyaratan-persyaratan tersebut diatas, tampaknya *rechtssaft* cenderung ke arah positivism hukum (*positivism yuridis*). Sebagai konsekuensi dari positivism hukum, hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk UU (*legislatif*). Tujuan pembentukan UU disini adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas, untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan menciptakan pengadilan yang bebas dan mandiri.⁶⁸

Dengan demikian, instrumentasi UU dan hukum merupakan titik kunci bagi negara hukum. Kesalahan dalam Implementasi dapat menjadikan negara hukum hanya sekadar negara aturan atau negara UU yang utopis.

Adapun negara hukum Indonesia sendiri berdasar pada UUD 1945, dan dibangun diatas prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan dan kemanusiaan. Kritisasi dari prinsip-prinsip itu tampak termuat dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa menurut dari kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁶⁸Marzuki Wahid,Rumadi, *Op. Cit. Fiqh Madzhab Negara...*,h. 50-51.

Dalam pemikiran tersebut, Abdul Hakim G. Nusantara menguraikan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dalam bentuk praktis-strategis sebagai berikut⁶⁹ :

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan rakyat, bentuk operasionalnya dilakukan melalui pemilihan umum guna memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam parlemen (DPR), dan kemudian untuk menyusun keanggotaan MPR. MPR inilah yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan menetapkan GBHN.
2. Adanya pembagian kekuasaan yang seimbang yang menggambarkan secara nyata adanya sistem *check and balance* antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah.
4. Bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum positif yang berlaku.
5. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.

⁶⁹*Ibid.* h. 53.

6. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin kesejahteraan yang merata dan sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Menurut Fajlurrahman Jurdi, Secara historis, konsep negara hukum dapat diasalkan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebertahanan, bergerak dari individu menuju relasi sosial sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan-kesepakatan ataupun konsensus-konsensus yang lazim disebut kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum yakni hasil kesepakatan sosial.⁷⁰

Dengan demikian kedaulatan dalam negara ada pada hukum yang seluruh entitas politik, sosial, dan ekonomi dibawahnya tunduk pada hukum tersebut. Dalam hal ini pemerintah pun tunduk pada hukum. Tentu berbeda dari lawannya yakni kedaulatan berdasar kekuasaan yang terpresentasi dalam sistem pemerintahan monarki dimana raja adalah sumber hukum itu sendiri, selainnya adalah obyek belaka yang harus menaati hukum yang diputuskan oleh sang raja. Raja sebagai penguasa adalah pembentuk hukum, dirinya tentu terpisah dari kewajiban yang tertera dalam hukum, karena hukum dibentuk bukan untuk mengatur diri dan negaranya namun untuk rakyatnya. Tegasnya, kedaulatan

⁷⁰Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum Op. Cit* , h.viii.

dalam konsep negara bersumber konsensus rakyat, sementara dalam negara kekuasaan kedaulatan bersumber dari raja yang berkuasa.⁷¹

Namun dalam perkembangannya saat ini, hampir seluruh negara telah menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun masih terdapat negara-negara tertentu yang masih bertahan dengan sistem kedaulatan berdasar kekuasaan (penguasa). Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi (aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*.

Dalam konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada “kepastian hukum” sementara konsepsi negara hukum *rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Tradisi negara hukum *rechtsstaat* dikenal dengan konsep *civil law system* sementara negara hukum *the rule of law* disebut *common law system*. secara teoritis perbedaan aliran kedua konsep negara hukum ini bisa dicermati dalam pandangannya mengenai arti hukum itu sendiri.

Tradisi *civil law system* megorientasikan diri bahwa eksistensi hukum adalah kepastian yang diekspresikan pada kekukuhannya berpegang pada kodifikasi

⁷¹Ibid. ix.

(undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis), karenanya dianggap dapat memberikan kepastian hukum. Sementara, tradisi *common law system* melihat eksistensi hukum sebagai perwujudan keadilan yang sifatnya lebih luas dari sekedar apa yang tertulis. Tentu saja keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing namun tetap saja tak luput dari faktor ideology yang dikembangkan oleh negara itu. Faktor ideology turut mempengaruhi model sistem kenegaraannya, seperti negara sosialis yang memiliki model hukum tersendiri, *socialist legal*, maupun seperti negara Indonesia dengan ideology pancasilanya yang dikenal bercorak integralistik.⁷²

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokratis itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demorasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Hal yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Sementara unsur-unsur negara hukum berakar pada sejarah perkembangan suatu bangsa. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut⁷³ :

⁷²*Ibid.* h. x.

⁷³*Ibid.* h. 29.

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia
2. Asas kesepakatan hukum
Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin, *predikstabilitas*, dan bertujuan untuk mencegah bahwa yang terkuat yang berlaku.
3. Asas similia similibus (*asas persamaan*)
Dalam negara hukum, pemerintahan tidak boleh mengistimewakan orang tertentu. Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karenanya harus dirumuskan secara umum dan abstrak.
4. Asas demokrasi
Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama mempengaruhi tindakan pemerintah. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang memiliki peranan dalam pembentukan UU dan kontrol terhadap pemerintah.
5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan

warga negara, semua kegiatan pemerintah harus terarah kesejahteraan umum.⁷⁴

Konsep pokok dari negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan didalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demorasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.

Dalam konsep pemikiran Fajlurrahman Jurdi ada beberapa tipe negara hukum yaitu :

1. Negara Hukum Profetik
2. Rechtsstaat
3. Common Law
4. Socialist Legality
5. Negara Hukum Integralistik
6. Negara Hukum Pancasila

⁷⁴*Ibid.* h. 30.

7. Negara Hukum Postmodern

8. Negara Hukum Pascakolonial.⁷⁵

1. Negara Hukum Profetik

Istilah profetik, pertama kali diperkenalkan oleh kuntowijoyo. Beliau memperkenalkan apa yang disebut dengan ilmu sosial profetik (ISP). Kata profetik sendiri berarti kenabian. Negara hukum profetik bisa juga diartikan negara Islam yang memiliki keterkaitan dengan setting history masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW hidup.

Dalam konteks ini, ada mimpi masa lalu yang datang menyerang kita di masa kini, yaitu mimpi ingin melihat “negara kenabian” sebagai postulat untuk mendorong kesejahteraan. Bahwa konsep kenegaraan masa kini, dengan tokoh-tokoh yang datang dari barat, “dituduh” menjadi penyebab dari keterbelakangan ekonomi, kegaualan politik dan demoralisasi kultural. Sebab itu, tuntutan menghadirkan “negara kenabian” (*Prophetic State*) menjadi sebuah kajian yang cukup hidup saat inui. *Prophetic State* adalah merupakan konstruksi masa lalu yang hendak dihidupkan kembali, sebagai alternative atas berbagai persolaan kebangsaan dan kemanusiaan masa kini.

Ada kecenderungan penglihatan, bahwa model negara Madinah, dianggap sebagai dasar sejarah pembentukan negara Islam, dengan asumsi-asumsi syariah-teologis, historis dan sosiologis. Kenabian yang eklektik, eksotik dan esoteric, mendapatkan momentum di masa kini, pada saat tesis negara modern

⁷⁵*Ibid.* h. 30.

menjadi persoalan bagi ketidakadilan yang muncul di berbagai ranah sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Selain itu Ibnu Khaldun, salah satu pemikir Islam yang meletakkan dasar-dasar teori negara Islam, menentukan tipologi negara yang menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya, ia menggambarkan dua keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum yaitu : 1). Siyasah Diniyah, yang diterjemahkan oleh Azhari sebagai nomokrasi 2). Siyasah Aqliyah, yang oleh Azhari menerjemahkannya sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia.⁷⁶

Salah satu elemen penting yang menjadi rujukan *hukum profetik* atau *nomokrasi Islam* adalah konsepsi dan bangunan negara hukum di Madinah, yakni negara yang dibentuk dan ditata dengan hukum ketuhanan yang diatur dibawah kepemimpinan kenabian. Meskipun tidak secara langsung merupakan firman Allah, piagam Madinah merupakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Rechtsstaat

⁷⁶ Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, Op.Cit.h.85.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam penjelasan UUD 45 apa yang disebut “negara hukum” disebutkan disitu secara lebih lengkap dalam suatu rangkaian kata-kata : “negara yang berdasarkan hukum”. Sebenarnya istilah ini, entah dituliskan pendek-pendek entah pula dituliskan agak panjang sebagai suatu frase, adalah hasil terjemahan dari istilah hukum berbahasa Belanda *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* ini atau yang didalam bahasa Jerman dituliskan *Rechtsstaat* atau pula didalam bahasa Inggris dituliskan *the law state* atau *(supreme) state of law*, yang berarti status hukum yang tertinggi dan berkekuatan *ruing*) tersimak dalam perundang-undangan di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1854, ialah tahun diundangkannya *regeringsreglement* India Belanda.

Wignjosoebroto menegaskan bahwa “sesungguhnya, konsep ‘*rechtstaat*’ atau ‘negara hukum’ ini adalah konsep yang datang dan berasal dari luar wilayah peradaban pribumi”.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berasal dari dua tradisi hukum berbeda, yaitu *rechtstaat* dan *the rule of law*. Istilah *rechtstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa continental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *anglo saxonyang* bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan titik berat pengoperasian.

Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kedua konsep itu memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri *rechtssaats* meliputi :⁷⁷

- a. Adanya perlindungan terhadap HAM
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan ciri-ciri *the rule of law* adalah :

- a. Adanya supremasi aturan hukum
- b. Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum
- c. Adanya jaminan perlindungan HAM

3. Common Law

Paham *the rule of law* dalam sistem hukum anglo Saxon pada hakikatnya tidak berbeda dari paham *rechtssaats* dalam sistem hukum Eropa Kontinental karena memiliki makna inti *the laws which govern and not men*. Sistem hukum Eropa Kontinental *rechtssaats* muncul sebagai suatu sistem yang rasional dan revolusioner terhadap absolutism. Sedangkan sistem hukum Anglo Saxon *the rule of law* berkembang secara evolusioner sebagai usaha untuk melepaskan diri sistem absolutism.

Adapun unsur-unsur konsep *the rule of law* menurut *internasional commission of jurist* dalam kongresnya di Bangkok tahun 1965 yaitu sebagai berikut :⁷⁸

⁷⁷Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...*, *Op.Cit.* h. 93.

1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya pendidikan civic

Keberadaan sistem hukum Anglo Saxon yang disebut sebagai *Commonn law system*, adalah merupakan salah satu perangkat penting dalam upaya mendorong pemerintahan yang demokratis, sekaligus menghindari totalitarianism.

4. *socialist legality*

Substansi *socialist legality* berbeda dengan konsep negara hukum *rechtssaat* maupun *rule of law*. Dalam negara hukum *socialist legality*, hukum ditempatkan dibawah sosialisme. Hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. *Socialist law* adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Kata sosialis ketika digunakan dalam hubungannya dengan hukum mengandung banyak berbeda di antara para ahli hukum. Negara dalam konteks *socialist legality* juga dikenal, sehingga apabila dikonversi dalam konteks negara

⁷⁸Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum...*, Op. Cit , h. 56-57.

hukum Indonesia , keberadaan komisi-komisi negara ini diterima sebagai sesuatu yang tidak terbantahkan.

5. Negara Hukum Integralistik

UUD 1945 pra-amandemen dinilai banyak pihak bertentangan tangan dengan teori konstitusi modern. Ada gagasan yang saling bertentangan antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara paham negara hukum dan paham kekuasaan.⁷⁹

Pemikiran Soepomo, pakar hukum adat, yang menurut banyak pihak itu memengaruhi perumusan UUD 1945, dengan apa yang disebutnya sebagai ide negara ‘integralistik’ atau paham negara ‘kekeluargaan’. Soepomo berpandangan bahwa prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya, cocok dengan pikir ketimuran. Dikatakannya, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Struktur sosial Indonesia meliputi antara aliran pikiran dan semangat kebatinan, struktur kerohanian yang bersifat cita-cita tentang persatuan hidup, antara persatuan *kawulo* dan *gusti*, persatuan dunia luar dan dunia batin, persatuan *mikrokosmos* dan *makrokosmos*, persatuan rakyat dan pemimpinnya.

6. Negara Hukum Pancasila

Para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum barat, melainkan juga berakar pada tradisi

⁷⁹*Ibid.*h. 66.

asli bangsa Indonesia. Paradigm bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna lima prinsip bernegara, yakni ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial ke dalam suatu konsep *pancasila*. Demikian pula halnya, para pendiri negara mengadopsi konsep negara hukum dari konsep *rechtstaat* pada tradisi hukum Eropa Kontinental, tetapi berupaya untuk memberi muatan substansi yang berbasis pada tradisi bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep negara hukum Indonesia.

7. Negara Hukum Post Modern

Istilah *pasca modern* atau *postmodern* adalah merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan politik terhadap praktik-praktik modernitas. Kritik dan persinggungan antara dunia modern yang telah menciptakan kemunduran digugat oleh teori pasca modern. Didalam teori pasca modern kekuatan-kekuatan modern beserta segala implikasi yang ditimbulkannya telah membawa banyak kemunduran bagi peradaban manusia. Sebab itu, hukum modern yang cenderung melindungi kekuatan status quo ekonomi, politik dan kebudayaan materialistis digugat oleh *postmodern*.⁸⁰

Negara hukum *postmodern* membangun kembali kesadaran, bahwa :

1. Hukum sebagai instrument bukanlah milik negara yang digenggam erat dan dianggap memiliki otoritas sendiri, tetapi hukum bekerja dalam lorong-lorong kehidupan masyarakat.

⁸⁰*Ibid.* h. 80.

2. Hukum bukanlah suatu instrument positivis yang dipahami seperti jaksa-hakim-polisi, tetapi hukum adalah merupakan universalitas nilai
3. Hukum adalah kesadaran kolektif suatu komunitas tentang keteraturan, kebersamaan, integritas, dan formasi kultur yang heterogen.

8. Negara Hukum Pascakolonial

Istilah negara hukum pascakolonial adalah menemukan suatu kajian baru bagi negara yang pernah mengalami penjajahan. Penjajahan atau kolonialis meninggalkan tanah jajahannya, tidak pergi begitu saja dan tanpa jejak. Namun, ada sejumlah jejak yang ditinggalkan oleh kolonialis atas tanah jajahan mereka. Selain benda-benda yang berupa symbol kesewenang-wenangan kolonialis, yang paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari senjata dan granat adalah merupakan pengetahuan dan keyakinan.

Dengan demikian, suatu pascakolonial adalah upaya untuk melihat keterkaitan antara masa lalu dengan masa kini. Cara-cara, ide, dan pengetahuan masa lalu yang hadir dan bersenggama dengan masa kini, masa dimana kolonialisme sudah tidak ada dan menyeruak lagi, namun sisa-sisa dari hantu kolonialisme itu masih hidup dalam pikiran bangsa yang teerjajah.

D. Pandangan Fajlurrhaman Jurdi tentang Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Pemikiran-pemikiran berkaitan dengan konsepsi negara menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyyah haruslah dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam Islam dapat pertama-tama meninjaunya dari Al-Quran sebagai sumber utama pemikiran Islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata *Al-Hukm*.

Kata *Al-hukm* dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan dalam Al-Quran sejumlah 210 buah. Diantaranya terdapat kata kerja dengan pola *hakama* “memutuskan perkara, membuat keputusan” 45 buah ; pola *ahkama* “mengokohkan” dua kali; dan pola *tahakama* “berhakimkan atau mengikuti keputusan seseorang” sekali. Kata *Al Hukm* sendiri merupakan masdar kata kerja *hakama-yahkumu-hukman* yang dipergunakan 30 kali. Kata *hukm* ini dialihbahasakan menjadi kata *hukum* dalam bahasa Indonesia dengan arti “peraturan, ketentuan, atau putusan”. Dalam bahasa arab kata tersebut dapat dipergunakan secara konotatif perbuatan atau sifat.⁸¹

Bertolak dari sini, sebagai perbuatan, *hukum* bermakna membuat atau menjalankan keputusan, dalam hal ini obyek atau hasil perbuatan, kata tersebut merujuk kepada sesuatu yang diputuskan, yakni keputusan atau peraturan seperti

⁸¹ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Rajawali Press, Jakarta, 1994), h. 159.

yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata *hukum*. makna tersebut apabila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat maka kata tersebut dapat mengandung makna pembuat kebijaksanaan atau sebagai upaya pengaturan masyarakat.

Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan kepada dasar hukum yang dibuat untuk dijadikan sebuah landasan. Sedangkan landasan hukum Indonesia terletak pada prinsip Pancasila yang utama yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kemudian dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di dalamnya secara menyeluruh (Nasional), bagi masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dapat dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Islam dapat disamakan dengan teokrasi seperti yang dipahami di Barat. Dalam teokrasi, penguasa memegang mandate dari Tuhan sementara dalam monokrasi Islam kepala negara (penguasa) menjalankan negara berdasarkan kepada hukum syariat yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW. Maka penguasa melaksanakan apa saja yang disebutkan dalam Alquran dan Sunnah. Dalam monokrasi Islam kepala negara bukanlah sosok *untouchable man*, dia sama dengan warga negara lainnya yang tidak kebal dimata hukum, kepala negara adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serangking sehingga semua tindakannya dapat dikontrol oleh masyarakat.

Negara Islam adalah negara yang konstitusional atau negara yang berdasarkan syariat. Negara ini mempunyai konstitusi sebagai landasan dan

hukum sebagai pedoman. Konstitusi negara Islam adalah prinsip dan hukum syariat yang dibawa oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Sunah Rasulullah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, moral, pergaulan sosial, hubungan baik pribadi, disiplin, kriminal, administrasi, konstitusi, dan internasional. Dasar yang paling utama bagi negara adalah bahwa alhakimiyah kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah Swt sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikaitnya adalah khalifah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi harus bertindak di bawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab Allah dan Sunah Rasulnya.⁸²

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah negara hukum Islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan ijtihad para ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di Indonesia landasan paling utama adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman setiap rakyat Indonesia, dan selanjutnya peraturan-peraturan yang ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945.

Sumber ajaran Islam yakni alquran dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara, Islam hanya

⁸²Yusuf, Qardhawi, *Fiqh Negara* (Jakarta: Robbani Press,1997), h. 32.

mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip demokrasi Islam diantaranya :⁸³

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 58, yang di terjemahkan sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat diartikan dua garis hukum yaitu :

Garis hukum pertama : manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua : manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan

⁸³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Op.Cit.*, h. 105.

kewenangan dan arena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandate yang bersumber atau berasal dari Allah.

2. Prinsip penegakkan keadilan

Dalam surah an-Nisa/4:135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim kata keadilan :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Prinsip Islam dalam demokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transcendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam demokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan nya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.⁸⁴

3. Prinsip musyawarah

⁸⁴ *Ibid.* h. 117.

Prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imron : 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu farum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.⁸⁵

4. Prinsip perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

⁸⁵Ibid. h. 111.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Dalam pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam perkembangannya hampir seluruh negara menerpakan konsepsi negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi (aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Dalam konsepsi negara hukum *rechtstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Sementara konsepsi negara hukum *the rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Tradisi negara hukum *rechtstaat* dikenal dengan konsep *civil law system* sementara negara hukum *the rule of law* disebut *common law system*. Secara teoritis perbedaan aliran kedua konsep negara hukum ini bisa dicermati dalam pandangannya mengenai arti hukum itu sendiri.

Tradisi *civil law system* mengorientasikan diri bahwa ekstensi hukum adalah kepastian yang ekspresikan pada kekukuhannya berpegang pada kodifikasi

(undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis), karenanya dianggap dapat memberikan kepastian hukum. Sementara, tradisi *common law system* melihat eksistensi hukum sebagai perwujudan keadilan yang sifatnya lebih luas dari sekedar apa yang tertulis tentu saja keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing namun tetap saja tak luput dari faktor ideology yang dikembangkan oleh negara itu. Faktor ideology turut mempengaruhi system kenegaraannya, seperti negara sosialis yang memiliki model hukum tersendiri, maupun seperti negara Indonesia dengan idiologi pancasilanya yang dikenal bercorak integralistik.⁸⁶



⁸⁶Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum ..., Op. Cit* , h.ix-x.

BAB IV
ANALISIS KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT
FAJLURRAHMANJURDI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DUSTURIYAH

A. Konsep Negara Hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi

Menurut Fajlurrahman Jurdi, Secara historis, konsep negara hukum dapat diasalkan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebutuhannya, bergerak dari individu menuju relasi sosial sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan-kesepakatan ataupun konsensus-konsensus yang lazim disebut kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum yakni hasil kesepakatan sosial.

Dengan demikian kedaulatan dalam negara ada pada hukum yang seluruh entitas politik, sosial, dan ekonomi di bawahnya tunduk pada hukum tersebut. Dalam hal ini pemerintah pun tunduk pada hukum. Tentu berbeda dari lawannya yakni kedaulatan berdasar kekuasaan yang terpresentasi dalam sistem pemerintahan monarki dimana raja adalah sumber hukum itu sendiri, selainnya adalah obyek belaka yang harus menaati hukum yang diputuskan oleh sang raja. Raja sebagai penguasa adalah pembentuk hukum, dirinya tentu terpisah dari kewajiban yang tertera dalam hukum, karena hukum dibentuk bukan untuk mengatur diri dan negaranya namun untuk rakyatnya. Tegasnya, kedaulatan dalam

konsep negara bersumber konsensus rakyat, sementara dalam negara kekuasaan kedaulatan bersumber dari raja yang berkuasa.

Namun dalam perkembangannya saat ini, hampir seluruh negara telah menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala macam asas dan bentuknya, walaupun masih terdapat negara-negara tertentu yang masih bertahan dengan sistem kedaulatan berdasar kekuasaan (penguasa). Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi (aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*. Dalam konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni bahwa hukum identic dengan undang-undang sehingga ada “kepastian hukum” sementara konsepsi negara hukum *rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Tradisi negara hukum *rechtsstaat* dikenal dengan konsep *civil law system* sementara negara hukum *the rule of law* disebut *common law system*. secara teoritis perbedaan aliran kedua konsep negara hukum ini bisa dicermati dalam pandangannya mengenai arti hukum itu sendiri.

Tradisi *civil law system* megorientasikan diri bahwa eksistensi hukum adalah kepastian yang diekspresikan pada kekukuhannya berpegang pada kodifikasi (undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis), karenanya dianggap dapat memberikan kepastian hukum. Sementara, tradisi *common law system* melihat

eksistensi hukum sebagai perwujudan keadilan yang sifatnya lebih luas dari sekedar apa yang tertulis. Tentu saja keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing namun tetap saja tak luput dari faktor ideology yang dikembangkan oleh negara itu. Faktor ideology turut mempengaruhi model sistem kenegaraannya, seperti negara sosialis yang memiliki model hukum tersendiri, *socialist legal*, maupun seperti negara Indonesia dengan ideology pancasilanya yang dikenal bercorak integralistik.

Konsep pokok dari negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan didalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.

Dalam konsep pemikiran Fajlurrahman Jurdi ada beberapa tipe negara hukum yaitu :

1. Negara Hukum Profetik
2. Rechtsstaat
3. Common Law

4. Socialist Legality
5. Negara Hukum Integralistik
6. Negara Hukum Pancasila
7. Negara Hukum Postmodern
8. Negara Hukum Pascakolonial
9. Negara Hukum Profetik

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berasal dari dua tradisi hukum berbeda, yaitu *rechtssaft* dan *the rule of law*. Istilah *rechtssaft* banyak dianut di negara-negara Eropa continental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *anglo saxonyang* bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan titik berat pengoperasian. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kedua konsep itu memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri *rechtssaft* meliputi :

1. Adanya perlindungan terhadap HAM
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan ciri-ciri *the rule of law* adalah :

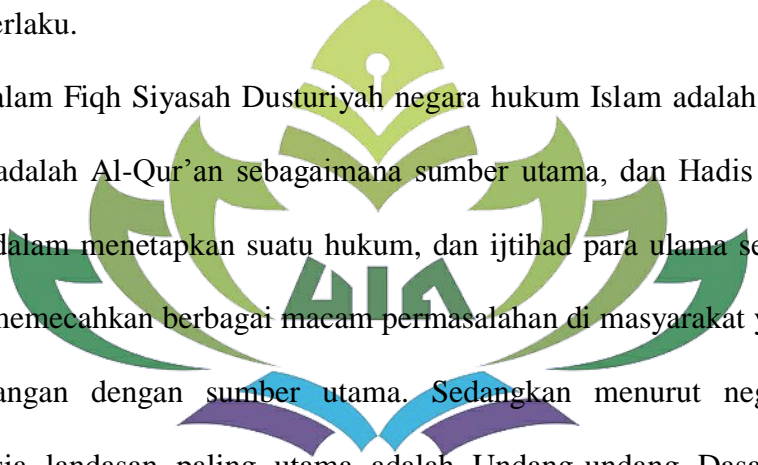
1. Adanya supremasi aturan hukum
2. Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum
3. Adanya jaminan perlindungan HAM

Dengan demikian Konsep Negara Hukum Menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam perkembangannya hampir seluruh negara menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala macam asas dan bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam pandangan Fajlurrahman Jurdi bahwa konsep negara hukum adalah kekuasaan pemimpin dalam menetapkan atau mengambil suatu keputusan harus berdasarkan kepada hukum atau konsep negara hukum *rechtstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Penulis dalam hal ini sependapat dengan pandangan Fajlurrahman Jurdi tentang konsep Negara Hukum bahwa suatu negara yang dipimpin oleh penguasa dalam menetapkan dan mengambil keputusan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat, bukannya untuk kepentingan pribadi atau semata-mata atas kekuasaan.

B. Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Pemikiran-pemikiran berkaitan dengan konsepsi negara menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyyah haruslah dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam Islam dapat pertama-tama meninjaunya dari Al-Quran sebagai sumber utama pemikiran Islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata *Al-Hukm*.

Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan kepada dasar hukum yang dibuat untuk dijadikan sebuah landasan. Sedangkan landasan hukum Indonesia terletak pada prinsip Pancasila yang utama yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kemudian dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di dalamnya secara menyeluruh (Nasional), bagi masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dapat dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah negara hukum Islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan ijtihad para ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di Indonesia landasan paling utama adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman setiap rakyat Indonesia, dan selanjutnya peraturan-peraturan yang ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945.

Sumber ajaran Islam yakni alquran dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara, Islam hanya mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi. Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa konsep negara hukum dalam Islam atau yang disebut dengan nomokrasi Islam adalah

suatu negara hukum yang mengacu pada hukum Islam dan memiliki prinsip-prinsip umum yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Sementara dalam konsep hukum yang dikemukakan oleh Fajlurrahman Jurdi bahwa terdapat asas-asas negara hukum seperti yang terdapat dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan,
2. Asas kepastian hukum
3. Asas *similia similibus* (Asas persamaan)
4. Asas Demokrasi
5. Pemeritahan dan Pejabat Pemerintah mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat.

Dari analisis di atas bahwa gagasan-gagasan dan pandangan Fajlurrahman Jurdi tentang konsep negara hukum itu sejalan dengan konsep negara hukum dalam bernegara dalam hal ini perspektif fiqh siyasah dusturiyyah atau lebih dikenal pada konsep negara hukum versi Barat, yaitu menggunakan istilah negara hukum dengan *rechtstaat*, dalam menerapkan atau menetapkan suatu keputusan hukum yang harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis, karena dianggap memberikan kepastian hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan urain yang telah penulis kemukakan dalam bab I hingga bab IV samapailah pada kesimpulan mengenai Konsep Negara Hukum menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang disimpulkan menjadi beberapa poin yakni :

1. Konsep Negara Hukum Menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam perkembangannya hampir seluruh negara menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam konsepsi negara hukum yang dikemukakan Fajlurrahman Jurdi yaitu bahwa sebuah kekuasaan bersumber dari hukum yakni kepastian sosial atau lebih megarah kepada yaitu konsep negara hukum *rechtstaat* yaitu negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2. Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah negara hukum Islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan ijtihad para ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di Indonesia landasan paling utama adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman setiap rakyat Indonesia, dan selanjutnya

peraturan-peraturan yang ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa konsep negara hukum bahwa terdapat asas-asas negara hukum sebagai berikut :

1. pengakuan,
2. Asas kepastian hukum
3. Asas *similia similibus* (Asas persamaan)
4. Asas Demokrasi
5. Pemerintahan dan Pejabat Pemerintah mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat.

Jadi dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa konsep negara hukum menurut Fajlurrahman Jurdi yaitu dalam menetapkan atau menerapkan suatu keputusan hukum harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis, karena dianggap memberikan kepastian hukum .

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang kenegarawan yang berkenaan dengan negara hukum dalam pemikiran Fajlurrahman Jurdi maupun para tokoh negarawan yang lainnya, Hendaknya melakukan identifikasi dan pembaharuan didalam literatur pemikirannya yang tertuang dalam buku-buku atau penunjang didalam pembuatan karya ilmiah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan perlu pemahaman yang mendalam guna memperoleh pemahaman terhadap ide-ide dan dalam mengeksplorasi

pemikiran Fajlurrahman Jurdi tentang negara hukum bahkan beberapa tema lainnya yang menarik untuk dikaji.

3. Penulis berharap, kita jangan menyalahkan begitu saja pemikiran Fajlurrahman Jurdi manakala bertentangan dengan alur pemikiran kita, Sebab mereka sebagai tokoh negarawan yang berhak melakukan ijtihad untuk mengeluarkan segala pendapatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- Ahmadi Muhammad Munawar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1975.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang : Angkasa Raya Padang, 1992.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang :Setara Press, 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media 2007.
- HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1982.
- M. Iwan Setiawan, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Kini*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : GamaMedia, 1999.
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, 2005.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, 1987.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Setia Senoadji, Oemar, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Praja, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Renika Cipta, Jakarta, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Fakultas Ekonomi, Jakarta, 1981.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1995.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Yusuf, Qardhawi, *Fiqh Negara*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Fajlurrahman Jurdi, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Fajlurrahman Jurdi](http://id.wikipedia.org/wiki/Fajlurrahman_Jurdi)., pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 22.39.

Fajlurrahman Jurdi, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Jurdi Fajlurrahman](https://id.wikipedia.org/wiki/Jurdi_Fajlurrahman)., pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 22.45.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : TAUFIQURRAHMAN HADI
NPM : 1321020122
JURUSAN : SIYASAH SYAR'IIYAH
**JUDUL SKRIPSI : KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT
PANDANGAN FAJLURRAHMAN JURDI DALAM
PRESFEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1	12 Juni 2017	BAB I (Judul, Rumusan Masalah, Latar Belakang, dan Metode Penelitian)	Perbaikan Proposal menurut catatan		...
2	7 Agustus 2017	BAB I (dilanjutkan sampai BAB V)	ACC		...
3	15 Agustus 2017	BAB I (dilanjutkan sampai BAB V))	ACC	...	
4	10 September 2017	Perbaikan penulisan BAB I- V	Perbaikan Menurut Catatan		...
5	10 Mei 2018	Perbaikan penulisan (abstrak,motto,ka ta pengantar, riwayat hidup	Perbaikan Menurut Catatan		...

		dll)			
6	25 Mei 2018	BAB I-V (Abstrak)	ACC ke Pembimbing I/ di munaqasyah- kan	
7	9 Juni 2018	BAB I-V (Abstrak)	Perbaikan Menurut Catatan	...	
8	25 Juni 2018		ACC untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah	



Bandar Lampung, 26 Juni 2018

Pembimbing I
 Pembimbing II

Drs. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Badruzzaman, S.Ag.
NIP. 196806241997031000